



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 263 /KEP/HK/2021**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2021-2026


**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 oleh Tim Evaluasi Provinsi;
  - b. bahwa sesuai Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 Nomor: BP4D.045.1.2/PPEPD.529/06/2021;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor register peraturan daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, segera disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian. 

- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Juli

2021

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Manggarai di Ruteng;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 263 /KEP/HK/ 2021**  
**TANGGAL : 2 Juli 2021**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN 2021-2026**

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.	<p><b>Mengingat :</b></p> <p>3. <b>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ... dst;</b></p>	<p><b>Mengingat :</b></p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>
		<p><b>BAB I</b></p> <p><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p>.....</p> <p><b>Pasal 1</b></p> <p>1. Rencana Strategis Perangkat ... dst ... periode 5 (lima) <b>tahunan</b>.</p> <p>2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ... dst ... periode 1 (satu) <b>tahunan</b>.</p>	<p><b>BAB I</b></p> <p><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p><b>Pasal 1</b></p> <p>1. Rencana Strategis Perangkat ...dst ... periode 5 (lima) tahun.</p> <p>2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ... dst ... periode 1 (satu) tahun.</p> <p><b>Ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu definisi RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</b></p>

		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) ....</p> <p>(2) <b>Tujuan RPJMD ... dst ... :</b></p> <p>b. Menjadi pedoman dalam penyusunan <b>Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD),</b> dan perencanaan;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) ....</p> <p>(2) Tujuan RPJMD ... dst ... :</p> <p>b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD, RKPD, Renja-PD dan perencanaan;</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>ISI DAN SISTIMATIKA RPJMD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Sistematika RPJMD meliputi:</p> <p>c. Bab III gambaran <b>keuangan;</b></p> <p>d. Bab IV permasalahan dan <b>isu-isu</b> strategis Daerah;</p> <p>f. Bab VI strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah;</p> <p>g. Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat <b>daerah;</b></p> <p>h. Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah <b>daerah;</b> dan</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>ISI DAN SISTEMATIKA RPJMD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Sistematika RPJMD meliputi:</p> <p>c. Bab III gambaran keuangan Daerah;</p> <p>d. Bab IV permasalahan dan isu strategis Daerah;</p> <p>f. Bab VI strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;</p> <p>g. Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat Daerah;</p> <p>h. Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

